



PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

REVIU KE-I PERJANJIAN KINERJA *Tahun 2024*



☎ 021-31966163

🌐 ptun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [ptun.jakarta.117](https://www.instagram.com/ptun.jakarta.117)

✉ ptun.jakarta@gmail.com



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA**

Jalan Cikini Raya Nomor 117, RT 10 RW 4, Cikini, Kecamatan Menteng
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10330. www.pttun-jakarta.go.id

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU KE-1
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2024**

Kami telah mereviu ke-1 atas Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024 sebagai tindak lanjut hasil evaluasi capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Catatan Evaluator Bawas LHE PTTUN Jakarta tentang kualitas rumusan hasil (Tujuan/Sasaran) dalam upaya perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja untuk mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik sesuai tata cara pelaksanaan Reviu. Substansi informasi yang dimuat dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) menjadi tanggung jawab Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Informasi perubahan data yang termuat dalam Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) dapat digunakan dalam penyusunan dokumen terkait lainnya setelah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

No	Perubahan		
	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan
1.	Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk perkara banding tahun 2024 semula 40%	Target persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi untuk perkara banding tahun 2024 menjadi 15%	Perkara pada tingkat pertama banyak dikabulkan dan di tingkat banding keputusannya banyak dikuatkan sehingga banyak pejabat TUN yang kalah mempunyai kecenderungan untuk melakukan upaya hukum sampai kasasi.
2.	-	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang	Penyelarasan dokumen perencanaan dari catatan rekomendasi LHE Bawas terkait pohon kinerja, Renstra

No	Perubahan		
	Semula	Menjadi	Alasan Perubahan
		teknis yudisial dengan target sebesar 100%	2020-2024, dan IKU
3.	-	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi dengan target sebesar 90%	
4.	-	Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dengan target sebesar 85%	
5.	-	Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan dengan target sebesar 85%	
6.	-	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) dengan target sebesar 100%	

Reviu ke-1 bertujuan untuk memberikan keyakinan Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) telah disajikan secara akurat, andal dan relevan untuk digunakan sebagai tolak ukur pencapaian kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Jakarta, 20 Desember 2024

KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA



H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

REVIU SHEET KE-1
PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Reviu ke-1 Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Tahun 2024 pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah di reviu menyelaraskan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

No.	Koreksi/Saran/Masukan	Halaman
1.	Perubahan target pada indikator “Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” - Perkara Banding (15%)	2
2.	Penambahan indikator “Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial dengan target sebesar 100%	2
3.	Penambahan indikator Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi dengan target sebesar 90%	2
4.	Penambahan indikator Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti dengan target sebesar 85%	2
5.	Penambahan indikator Persentase Pengaduan Yang Selesai Ditindaklanjuti dan Dipublikasikan dengan target sebesar 85%	3
6.	Penambahan indikator Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja) dengan target sebesar 100%	3

Jakarta, 20 Desember 2024

9. KETUA PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA JAKARTA

9. 
H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001 1

REVIU KE -1 PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : MARSEKAL MUDA TNI DR. YUWONO AGUNG NUGROHO,
S.H., M.H.
Jabatan : Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan
Tata Usaha Negara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

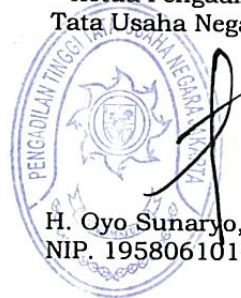
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
Dan Peradilan Tata Usaha Negara



Marsèkal Muda TNI
DR. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.
NRP. 525775

Jakarta, 20 Desember 2024
Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta



H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.
NIP. 195806101985031001

REVIU KE-1 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi. 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	100% 90% 15% 25% 91%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu. b. Persentase salinan putusan perkara gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.	100% 100%
3.	Meningkatnya hasil pembinaan bagi aparatur tenaga teknis dilingkungan peradilan	Persentase SDM teknis yang mempunyai kemampuan dibidang teknis yudisial	100%
4.	Meningkatnya Kompetensi SDM Non Teknis Peradilan	Persentase SDM non teknis peradilan yang mengikuti diklat, bimtek, dan sosialisasi.	90%
5.	Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal	a. Persentase pengaduan yang dapat ditindaklanjuti	85%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		b. Persentase pengaduan yang selesai ditindaklanjuti dan dipublikasikan	85%
6.	Meningkatnya transparansi pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, dan aset	Persentase peningkatan produktivitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kinerja)	100%

Kegiatan

Anggaran

1. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp 1.500.000.000
2. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama Rp 13.601.391.000
3. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara Rp. 99.230.000

Jakarta, 20 Desember 2024

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
Dan Peradilan Tata Usaha Negara



Marsekal Muda TNI
DR. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.
NRP. 525775

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta



H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.
NIP. 195806101985031001

LAMPIRAN 1

SK TIM REVIU DOKUMEN SAKIP 2024



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

Nomor : 1504/KPT.TUN.W2-TUN/RA1.1/XII/2024

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM REVIU DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024**

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang :
- a. Bahwa Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan berisi pertanggung jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan / sasaran strategis instansi, yang dalam penyusunannya memerlukan kecermatan dan ketelitian dalam pelaksanaan tugas dan fungsi peradilan;
 - b. Bahwa agar dalam penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut dapat menggambarkan kinerja suatu instansi dan memenuhi standar penyusunan sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan, maka perlu dibentuk Tim Reviu Penyusun Dokumen SAKIP ;
 - c. Bahwa nama-nama yang tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 ;
 4. Peraturan Presiden RI Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/II/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
 6. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Repeublik Indonesia;
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
 8. Peraturan Presiden.....

8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
11. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 Tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)TAHUN 2024 PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Pertama : Dokumen SAKIP tersebut terdiri dari Pohon Kinerja, Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (Rennstra) Tahun 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024, dan Rencana Aksi Tahun 2024.
- Kedua : Menunjuk dan menugaskan kepada nama-nama yang terlampir dalam Surat Keputusan ini untuk melaksanakan Reviu Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun 2024;
- Ketiga : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Tahun Anggaran 2024;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 16 Desember 2024

Ketua

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

H. OYO SUNARYO, SH.MH
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat
4. Arsip

Lampiran I Keputusan
Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta
Nomor : 1504/KPT.TUN.W2-TUN/RA1.1/XII/2024
Tanggal : 16 Desember 2024

**TIM REVIU DOKUMEN
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
TAHUN 2024**

NO.	JABATAN	:	NAMA
1.	Pelindung	:	H. Oyo Sunaryo, S.H., M.H.
2.	Penasehat	:	Dr. H. Bambang Heriyanto, S.H., M.H.
3.	Penanggung Jawab bidang Kepaniteraan	:	Yusran Iberahim, S.H
4.	Penanggung Jawab bidang Kesekretariatan	:	Drs. Muhidin, M.H.
5.	Tim Pengolah Data	:	1. Ono Haryono, S.E 2. Wahyu Suprpto, S.Ip 3. Pattie Oktavatie, S.H 4. Nurul Faradhilah, S.H. 5. Karunia Dwi Putri Paramita, A.Md 6. Santi Gustiani, S.E
6.	Tim Sekretariat	:	1. Firmansyah, S.H 2. Dwi Henny Febriati, S.H 3. Meyke Herbita Sari, S.M. 4. Sari Meilisna, Amd 5. Muhammad Alifian Geraldi Fauzi, S.H

Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

H. OYO SUNARYO, SH.MH
NIP. 19580610198503 1 001

Tembusan:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung di Jakarta
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan di Tempat

LAMPIRAN 2

SK PENETAPAN DOKUMEN REVIU SAKIP 2024



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KEPUTUSAN

**KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA
NOMOR: 1572 /KPTTUN.W2-TUN/RA1.1/XII/2024**

TENTANG

**PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (REVIU KE-1 IKU 2024, REVIU KE-3
RENSTRA 2020-2024, REVIU KE-1 PKT 2024, REVIU KE-2 RKT 2024,
REVIU KE-1 RENCANA AKSI 2024)**

PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu dilaksanakan dan diimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan;
 - b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka kementerian/lembaga perlu melakukan penyelarasan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pengendalian dan Pelaporan Kinerja, serta Evaluasi dan tindak lanjut atas hasil evaluasi, berupa perbaikan kinerja secara berkelanjutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tentang Penetapan Dokumen SAKIP (Reviu Ke-1 IKU 2024, Reviu Ke-3 Renstra 2020-2024, Reviu Ke-1 PKT 2024, Reviu Ke-2 RKT 2024, Reviu Ke-1 Rencana Aksi 2024 di Lingkungan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

Mengingat.....

- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
8. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama Di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.
- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 1504/KPTTUN.W2-TUN/RA1.1/XII/2024 Tentang Penunjukan Tim Reviu Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024;

2. Hasil Rapat.....

2. Hasil Rapat Tim Reviu Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2024 tanggal 19 Desember 2024 tentang Pembahasan Reviu Dokumen SAKIP 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA TENTANG PENETAPAN DOKUMEN SAKIP (REVIU KE-1 IKU 2024, REVIU KE-3 RENSTRA 2020-2024, REVIU KE-1 PKT 2024, REVIU KE-2 RKT 2024, REVIU KE-1 RENCANA AKSI 2024) PADA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA;

Kesatu Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
Pada Tanggal : 23 Desember 2024

KETUA
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA



H. OYO SUNARYO, SH.,M.H. ✍
NIP. 19580610 198503 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung RI di Jakarta
3. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta
4. Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung RI di Jakarta

LAMPIRAN 3

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
Jabatan : Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara

H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19680523 199212 1 002

Jakarta, 17 Januari 2024

Pihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta

H. OYO SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan b. Persentase perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum Kasasi. 1. Perkara Banding 2. Perkara Gugatan c. Indeks persepsi <i>stakeholder</i> yang puas terhadap layanan peradilan.	100% 90% 40% 25% 91%
2.	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan perkara banding yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu. b. Persentase salinan putusan perkara gugatan yang dikirim kepada para pihak/pengadilan pengaju tepat waktu.	100% 100%

Kegiatan

1. Program Dukungan Manajemen

Anggaran

Rp. 15.818.091.000

2. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara

Rp. 99.230.000

Rihak Kedua,
Plt. Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara



H. BAMBANG MYANTO, S.H., M.H.
NIP. 19680523 199212 1 002

Jakarta, 17 Januari 2024
Rihak Pertama,
Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Jakarta



H. OYO SULARKYO, S.H., M.H.
NIP. 19580610 198503 1 001



☎ 021-31966163

🌐 pttun.jakarta.go.id

📍 Jl. Cikini Raya No. 117 Menteng Jakarta Pusat

📷 [pttun.jakarta.117](https://www.instagram.com/pttun.jakarta.117)

✉ pttun.jakarta@gmail.com